

Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tangjung Jabung Barat

RENCANA KERJA 2021
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PERUBAHAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021. Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, maka masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Semoga Perubahan Rencana Kerja ini dapat menjadi acuan peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 29-6-2021

KEPALA BAPENDA



YON MERI, SP.ME.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690801 199703 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan	9
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	20
 BAB IV PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun berjalan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Dampak pandemi COVID-19 mempengaruhi terhadap APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mengalami Realokasi dan Rasionalisasi Belanja, Dalam hal tersebut diatas perlu dilakukan Perubahan Renja Tahun 2021.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambar pelayanan Perangkat Daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan, penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah memuat program-program sebagai penjabaran Renstra OPD dan RKPD, bertujuan untuk keselarasan dan kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah, dengan adanya Renja Perangkat Daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi

dengan program-program K/L dan Provinsi. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah dalam proses penyusunan RAPBD.

Atas dasar hal tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedepan dapat menjalankan tugas-tugas pokok dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Harapan tersebut akan menjadi komitmen kami yang dapat dituangkan dalam suatu perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa “Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021”.

1. 2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pijakan dalam perumusan dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021;
18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan, dimaksud sebagai

Dokumen Perencanaan Program Kegiatan yang memuat sasaran yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Indikator kinerja sasaran dan target masing-masing indikator sasaran program yang direncanakan.

TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 adalah untuk:

- Menjabarkan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati kedalam Bentuk Kebijakan dan Program Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan.
- Sebagai Instrumen untuk mempermudah dalam mengukur Kinerja dan mengevaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu tertentu.
- Meningkatkan Efisiensi dan efektifitas Pemanfaatan Sumber-sumber Potensi Daerah. Terutama berkaitan dengan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- Menjelaskan tugas – tugas pokok dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.

Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut:

TABEL 2.1
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH						REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
		TAHUN 2018 (thn n-2) 5	TAHUN 2019 (thn n-1) 6	TAHUN 2020 (thn n) 7	TAHUN 2021 (thn n+1) 8	TAHUN 2018 (thn n-2) 9	TAHUN 2019 (thn n-1) 10	TAHUN 2020 (thn n) 11	TAHUN 2021 (thn n+1) 12				
1	2											13	
1	Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	2.00	5.1	5.3	5.7	2.57	12.78	-3.88				5.7	Realisasi PAD Tahun 2020 dari target 6,3% terealisasi -3,88% dengan capaian kinerja -73,21%
	- Persentase tingkat Penerimaan 9 Pajak Daerah	10	12.12	12.43	12.98	11.02	9.79	-2.84				12.98	Realisasi pajak daerah Tahun 2020 dari target 12,43% terealisasi -2,84% dengan capaian kinerja -22,80%
	- Persentase peningkatan penerimaan PBB-P2 BPHTB	0.51	0.74	1.31	1.70	24.83	20.98	-33.06				1.70	Realisasi PBB-P2 BPHTB Tahun 2020 dari target 1,31% terealisasi -33,06% dengan capaian kinerja -2,523,42%
	- Persentase laporan pendapatan daerah tepat waktu dan benar	100	100	100	100	100	100	100				100	Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020 terealisasi 100%
	- Persentase potensi sumber pendapatan daerah yang diimplemetasikan	1	1	1	1	1	1	1				1	Potensi sumber pendapatan daerah yang diimplemetasikan sebesar 1% terealisasi 1% dengan capaian kinerja 100%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	76.61	77	78	-	77.7	78.24				78	Capaian Nilai IKM terhadap Pelayanan Pajak Daerah pada Tahun 2020 dari target 77 terealisasi 78.24 dengan capaian kinerja 101,61%

2.2. Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan

TABEL 2.2
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

NAMA SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Sebaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Tingkat Realisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah sampel dengan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2020 (Laki 2020)		Tingkat Realisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah yang direalisasi Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran rencana Perangkat Daerah id tahun 2021 (%)		Unit Perangkat daerah yang bertanggung jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah			11,326,265,118		11,326,265,118	1,910,161,781	2,789,469,185																	BAPENDA
		PROGRAM PENJUALAN URBAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	78		9,148,384,102	1,287,271,031	2,244,061,985																	
			Nilai AKOP	68																					
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen		91,430,500	8,006,000	33,868,000																	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	8 Dokumen		63,761,000	7,106,000	19,806,000																	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Capaian Kinerja	12 Laporan		27,669,500	900,000	14,062,000																	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen		7,236,894,575	1,001,058,446	1,747,172,325																	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang		6,960,824,575	937,231,946	1,680,992,325																	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	22 Orang		276,270,000	63,826,500	66,180,000																	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen		71,200,000	0	51,200,000																	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Indonesian/English) (output)	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Rp)		Realisasi Kinerja Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Rp)		Realisasi Kinerja Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Rp)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Rp)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Rp)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran rencana Pemerintah Daerah ad tahun 2021 (%)		Unit Pemangkal daerah yang bertanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pengadaan Pakaian Dinas Berastis Berserta Alas Kaki/Kelengkapan	Jumlah Pakaian Dinas Berastis Kelengkapannya	128 Stel	51,200,000	128 Stel	51,200,000	128 Stel	51,200,000	128 Stel	51,200,000	128 Stel	51,200,000	100.00%	100.00%	
		Seragam Teknis Implementasi Peraturan Pengelolaan-Udang	Jumlah Pegawai yang mengikuti Seragam Teknis	4 Orang	20,000,000	4 Orang	20,000,000	4 Orang	20,000,000	4 Orang	20,000,000	4 Orang	20,000,000	0.00%	0.00%	
		Administrasi Umum Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Umum Pemerintah Daerah	12 Bulan	834,565,210	12 Bulan	834,565,210	12 Bulan	834,565,210	12 Bulan	834,565,210	12 Bulan	834,565,210	38.88%	37.47%	
		Penyediaan Komponen Instansi Lelaki/Penanganan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Lelaki/Penanganan Bangunan Kantor	12 Bulan	38,274,522	12 Bulan	38,274,522	12 Bulan	38,274,522	12 Bulan	38,274,522	12 Bulan	38,274,522	29.25%	29.25%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 Jenis	199,857,031	35 Jenis	199,857,031	35 Jenis	199,857,031	35 Jenis	199,857,031	35 Jenis	199,857,031	57.72%	57.72%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Bulan	34,600,000	12 Bulan	34,600,000	12 Bulan	34,600,000	12 Bulan	34,600,000	12 Bulan	34,600,000	22.04%	22.04%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Perlengkapan	Jumlah Barang Cetak dan Perlengkapan	6 Jenis	111,480,657	6 Jenis	111,480,657	6 Jenis	111,480,657	6 Jenis	111,480,657	6 Jenis	111,480,657	53.99%	53.99%	
		Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Pengolahan Udang	Jumlah Bahan Baku yang disediakan	12 Bulan	6,600,000	12 Bulan	6,600,000	12 Bulan	6,600,000	12 Bulan	6,600,000	12 Bulan	6,600,000	45.45%	45.45%	
		Penyediaan Laporan Kendali dan Koordinasi SPPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Kendali SPPD	12 Bulan	443,753,000	12 Bulan	443,753,000	12 Bulan	443,753,000	12 Bulan	443,753,000	12 Bulan	443,753,000	25.44%	25.44%	
		Penyediaan Jasa Pengolahan Udang	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pengolahan Udang	12 Bulan	352,443,817	12 Bulan	352,443,817	12 Bulan	352,443,817	12 Bulan	352,443,817	12 Bulan	352,443,817	60.89%	61.89%	
		Penyediaan Jasa Sani Masyarakat	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Sani Masyarakat	12 Bulan	6,590,000	12 Bulan	6,590,000	12 Bulan	6,590,000	12 Bulan	6,590,000	12 Bulan	6,590,000	50.00%	50.00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	290,096,500	12 Bulan	290,096,500	12 Bulan	290,096,500	12 Bulan	290,096,500	12 Bulan	290,096,500	50.00%	28.15%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	55,757,317	12 Bulan	55,757,317	12 Bulan	55,757,317	12 Bulan	55,757,317	12 Bulan	55,757,317	50.00%	47.31%	

[illegible]

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi, selanjutnya kedepan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas.

Dampak pandemi Covid-19 mempengaruhi terhadap APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mengalami Mendahului Perubahan APBDP Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dimana terjadi rasionalisasi anggaran terhadap APBD Tahun 2021. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan Refocusing Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2021 untuk penanggulangan pandemi Covid-19, yang berpengaruh pada pencapaian target kinerja yang ditetapkan pada Renja Tahun 2021 dan target Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021. Badan Pendapatan Daerah mengalami perubahan pada Mendahului Perubahan dari pagu dana Rp. 11.574.150.097 menjadi Rp. 11.326.265.118 dengan rincian sebagai berikut :

PERKEMBANGAN MENDAHULUI PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2021 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja Tahun 2021	APBD MURNI TA. 2021	Mendahului Perubahan Pertama (MP 1)			Sumber Dana
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
6.02	KEUANGAN								
6.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai AKIP	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	79,00 69,50	11,574,160,097	11,326,265,118	(247,884,979)		
6.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	9 Dokumen	9,396,269,081	9,148,384,102	(247,884,979)		
6.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	8 Dokumen	91,430,500	91,430,500	-		
6.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Capaian Kinerja	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	12 Laporan	63,761,000	63,761,000	-	APBD	
6.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	1 Dokumen	27,669,500	27,669,500	-	APBD	
6.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	12 Bulan	7,484,779,664	7,236,894,575	(247,884,979)		
6.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	12 Bulan	7,208,509,554	6,960,624,575	(247,884,979)	APBD	
6.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	1 Dokumen	276,270,000	276,270,000	-	APBD	
6.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	126 Stel	71,200,000	71,200,000	-		
6.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	4 Orang	51,200,000	51,200,000	-	APBD	
6.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Umum Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	61 Jenis	20,000,000	20,000,000	-	APBD	
6.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi / Peningkatan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Peningkatan Bangunan Kantor	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	10 Jenis	834,666,210	834,666,210	-		
6.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	35 Jenis	38,274,522	38,274,522	-	APBD	
6.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	12 Bulan	199,857,031	199,857,031	-	APBD	
					34,600,000	34,600,000	-	APBD	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja Tahun 2021	APBD MURNI TA. 2021	Mendahului Perubahan Pertama (MP 1)			Sumber Dana
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	6 Jenis	111,480,657	111,480,657	111,480,657		APBD
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	12 Bulan	6,600,000	6,600,000	6,600,000		APBD
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	12 Bulan	443,753,000	443,753,000	443,753,000		APBD
6.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	12 Bulan	352,443,817	352,443,817	352,443,817	-	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	12 Bulan	6,590,000	6,590,000	6,590,000	-	APBD
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	12 Bulan	290,096,500	290,096,500	290,096,500	-	APBD
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	12 Bulan	55,757,317	55,757,317	55,757,317	-	APBD
6.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	181 Unit	561,850,000	561,850,000	561,850,000	-	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	1 Unit	48,000,000	48,000,000	48,000,000	-	APBD
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	41 Unit	203,600,000	203,600,000	203,600,000	-	APBD
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	138 Unit	182,450,000	182,450,000	182,450,000	-	APBD
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	1 Unit/450 M2	127,800,000	127,800,000	127,800,000	-	APBD
6.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	7.98%	2,177,881,016	2,177,881,016	2,177,881,016	-	
6.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	115,556,810,302	2,177,881,016	2,177,881,016	2,177,881,016	-	
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Penerimaan Dana Transfer Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	12 Laporan	44,389,745	44,389,745	44,389,745	-	APBD

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja Tahun 2021	APBD MURNI TA. 2021	Mendahulul Perubahan Pertama (MP 1)			Sumber Dana
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Produk Hukum Pajak Daerah yang diterbitkan Jumlah Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah Jumlah Sistem Informasi Pajak Daerah yang dikelola	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	3 Produk Hukum 1 Dokumen 5 Aplikasi	214,198,000	214,198,000	214,198,000	-	APBD
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Penyuluhan yang dilaksanakan Jumlah Media Publikasi Pajak Daerah yang dikelola	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	3 Kali 4 Media	78,991,785	78,991,785	78,991,785	-	APBD
5.02.04.2.01.05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah SSPD yang dilagih Jumlah Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Jumlah SPTPD/SKPD yang diterbitkan dan disampaikan kepada WPD Persentase Realisasi Penerimaan 9 Pajak Daerah Jumlah Pendaftaran dan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	10441 SSPD 16 Kali 10441 SPTPD/SKPD 100% 14600 SPTPD/SKPD	295,486,970	295,486,970	295,486,970	-	APBD
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2 yang dilaksanakan Realisasi Penerimaan PBB P2 Jumlah Data Wajib Pajak PBB-P2 Jumlah Data Objek dan Subjek BPHTB yang diverifikasi	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	1 Kali 6,000,000,000 7000 OP 700 OP	178,549,951	178,549,951	178,549,951	-	APBD
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Penyempalan SPPT dan Penagihan PBB P2 Jumlah Pelayanan Mobil Keliling PBB P2 Jumlah Penerbitan SPPT PBB P2 Jumlah Penetapan dan Pencetakan SPPT PBB-P2	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	110000 SPPT 88 Kali 114000 SPPT 700 OP 114000 SPPT	885,946,086	885,946,086	885,946,086	-	APBD
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Pengendalian Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	20 OP	368,714,728	368,714,728	368,714,728	-	APBD
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan Benda Berharga Jumlah Laporan Penerimaan dan Pendapatan Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	40 Jenis 12 Laporan	111,603,751	111,603,751	111,603,751	-	APBD
					11,574,160,097	11,574,160,097	11,326,266,118	(247,894,979)	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal maupun eksternal yang menjadi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Kekuatan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengelola Pendapatan Daerah antara lain :

1. Adanya Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
2. Tersedianya anggaran yang memadai dalam mengerjakan aktivitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun Kelemahan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Sumber daya manusia yang belum memadai khususnya dalam hal pendapatan daerah
2. Sarana dan Prasarana terbatas, berdampak kepada Kualitas dan Kuantitas Aparatur.
3. Peraturan Perundang – Undangan tentang Pajak/ Retribusi Daerah.

Peluang yang dimiliki oleh Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah
2. Letak Geografis yang strategis dengan potensi pendapatan daerah yang belum dikelola secara optimal.
3. Adanya sistem dan prosedur serta pelimpahan wewenang sebagai dasar dan acuan mengelola keuangan daerah.

Beberapa permasalahan yang masih menjadi tantangan (ancaman) dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Ketersediaan potensi sumber daya alam belum sepenuhnya dikelola dan bergantung kepada harga pasaran antaran *Supply* dan *Demand*, seperti halnya harga pasar dunia untuk harga Walet yang tidak stabil.
2. Sistem pengelolaan keuangan di organisasi instansi pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu dilaksanakan.
3. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah didukung dengan regulasi peraturan daerah, anggaran yang memadai yang ditunjang ketersediaan personil dan mobilitas operasional yang memadai untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah secara transparan. Peluang / potensi yang ada masih dapat untuk diberdayakan, didukung dengan aparatur dan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, penyusunan program pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terus berlanjut diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3
KEUANGAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	APBD
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	APBD
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	APBD
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	APBD

No	Program dan Kegiatan	Sumber Dana
1	2	3
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	APBD
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
7	Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	APBD
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	APBD
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	APBD
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	APBD
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	APBD
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	APBD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	APBD
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	APBD
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	APBD
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	APBD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
21	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	APBD
22	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	APBD
23	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	APBD
24	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	APBD
25	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	APBD
26	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	APBD
27	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	APBD
28	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	APBD

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Kode Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja Tahun 2021	SEBELUM PERUBAHAN		Sebelum Perubahan	Berubah/ Berkurang	Sumber Dana
						2021	MP 1			
5.02		KEUANGAN								
5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Mita ANP	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	78 68	9,390,269,081	9,148,284,102	10,307,238,065	1,158,953,983	
5.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	9 Dokumen	91,430,500	91,430,500	91,430,500	-	
5.02.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	8 Dokumen	63,761,000	63,761,000	63,761,000	-	APBD
5.02.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Capaian Kinerja	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	12 Laporan	27,669,500	27,669,500	27,669,500	-	APBD
5.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	1 Dokumen	7,484,779,554	7,238,894,575	7,540,535,891	322,641,316	
5.02.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	49 Orang	7,208,509,554	6,960,624,575	7,288,665,891	328,041,316	APBD
5.02.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	22 Orang	276,270,000	276,270,000	273,870,000	(2,400,000)	APBD
5.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	1 Dokumen	71,200,000	71,200,000	71,200,000	-	
5.02.01.2.05.02		Pengadaan Pakian Dinas Beserta Alat/ Perlengkapannya	Jumlah Pakian Dinas Beserta Alat/ Perlengkapannya	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	128 Set	51,200,000	51,200,000	51,200,000	-	APBD
5.02.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	4 Orang	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	APBD
5.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Umum Perangkat Daerah	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	12 Bulan	834,565,210	834,565,210	950,883,810	116,318,600	
5.02.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi/Perawatan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Peningkatan Bangunan Kantor	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	375 Buah	38,274,522	38,274,522	38,274,522	-	APBD
5.02.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	4665 Buah	199,857,031	199,857,031	199,857,031	-	APBD
5.02.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	914 Kotak	34,600,000	34,600,000	34,600,000	-	APBD
5.02.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	25416 Buah	111,480,657	111,480,657	227,579,257	116,098,600	APBD
5.02.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	BAPENDA Kab. Tanjung Barat	1800 Eksemplar	6,600,000	6,600,000	6,600,000	-	APBD

No	Kode Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja Tahun 2021	SEBELUM PERUBAHAN		Setelah Perubahan	Berlambah/ Berkurang	Sumber Dana
						2021	MP 1			
	5.02.01.2.08.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	443,753,000	443,753,000	443,753,000	-	APBD
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	151 Unit	-	-	488,114,047	488,114,047	
	5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	151 Unit	-	-	488,114,047	488,114,047	APBD
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	352,443,817	352,443,817	381,443,817	29,000,000	
	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	6,550,000	6,550,000	11,090,000	4,500,000	APBD
	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	290,098,500	290,098,500	314,598,500	24,500,000	APBD
	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Jasa Pelayanan Umum Kantor	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	12 Bulan	55,757,317	55,757,317	55,757,317	-	APBD
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	181 Unit	561,850,000	561,850,000	763,850,000	202,000,000	
	5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	1 Unit	48,000,000	48,000,000	48,000,000	-	APBD
	5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	41 Unit	203,600,000	203,600,000	227,600,000	24,000,000	APBD
	5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	138 Unit	182,450,000	182,450,000	360,450,000	178,000,000	APBD
	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	1 Unit	127,800,000	127,800,000	127,800,000	-	APBD
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	7.96%	2,177,881,016	2,177,881,016	2,496,340,420	318,459,404	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	115,554,810,302	2,177,881,016	2,177,881,016	2,496,340,420	318,459,404	
	5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah rapat koordinasi penyusunan rencana penerimaan pendapatan Jumlah Laporan Penatausahaan Penerimaan Dana Transfer	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	2 Kali 12 Laporan	44,388,745	44,388,745	45,152,965	763,250	APBD
	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	214,198,000	214,198,000	216,010,500	1,812,500	APBD
	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah produk hukum pengelolaan pajak daerah Jumlah Penyuluhan Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanjab Barat	3 Kali	78,991,785	78,991,785	107,547,773	28,555,988	APBD

No	Kode Kegiatan	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja Tahun 2021	SEBELUM PERUBAHAN		Setelah Perubahan	Berambah/ Berkurang	Sumber Dana
						2021	MP 1			
	5.02.04.2.01.05	Pendidikan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Pendidikan dan pendaftaran pajak daerah	BAPENDA Kab. Tanah Bata	7450 OPWP	295,485,970	295,488,970	338,176,970	42,690,000	APBD
	5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanah Bata	5 Aplikasi	178,549,951	178,549,951	178,549,951	-	APBD
	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah SPPT PBB P2 yang ditetapkan Jumlah SSPD BPHTB yang ditetapkan	BAPENDA Kab. Tanah Bata	105000 SPPT PBB P2 450 SSPD BPHTB	885,946,066	885,946,066	1,129,531,886	243,585,820	APBD
	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeliharaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Penerbitan dan Pemekasaan Pajak Daerah	BAPENDA Kab. Tanah Bata	20 OPWP	368,714,728	368,714,728	368,714,728	-	APBD
	5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pemenuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Jenis Pelayanan Benda Berharga	BAPENDA Kab. Tanah Bata	12 Laporan 40 Jenis	111,803,751	111,803,751	112,655,817	1,052,066	APBD
J U M L A H						11,574,150,087	11,320,265,118	12,803,578,485	1,477,313,367	

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Tahun 2021. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta peran aktif semua pihak yang terkait.

Kuala Tungkal, 29 - 6 - 2021

KEPALA BAPENDA,

YON HERI, SP.ME.
Pembina Utama Muda
Nip. 19690801 199703 1 007

BERITA ACARA
DESK RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2021.

Pada hari Rabu tanggal Tujuh Juli Tahun 2021 bertempat di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, telah dilaksanakan verifikasi usulan perubahan Rencana Kerja perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021.

Setelah melakukan pembahasan, forum menyepakati :

1. Perubahan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota :
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - semula MP 1 Rp. 6.960.509.554
 - bertambah Rp. 326.041.316
 - menjadi Rp. 7.286.665.891
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, pengurangan anggaran karena kelebihan pengangggaran pada honorarium pembantu pengguna barang :
 - semula Rp. 276.270.000
 - berkurang Rp. (2.400.000)
 - menjadi Rp. 273.870.000
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, penambahan anggaran untuk cetak himbauan pajak daerah :
 - semula Rp. 111.480.657
 - bertambah Rp. 116.098.600
 - menjadi Rp. 227.579.257
 - c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, untuk menunjang kegiatan pelayanan pajak daerah dan penambahan sub kegiatan pada Renja perubahan Tahun 2021
 - semula Rp. -
 - bertambah Rp. 488.114.047
 - menjadi Rp. 488.114.047
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, penambahan belanja paket/pengiriman
 - semula Rp. 6.590.000
 - bertambah Rp. 4.500.000
 - menjadi Rp. 11.090.000

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, pengurangan belanja BBM Generator (Mesin Genset dan menambah belanja langganan internet untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan dalam pelayanan pajak daerah secara online

semula	Rp. 290.096.500
bertambah	Rp. 24.500.000
menjadi	Rp. 314.596.500
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, untuk premi asuransi kendaraan dinas operasional yang habis masa berlakunya

semula	Rp. 203.600.000
bertambah	Rp. 24.000.000
menjadi	Rp. 227.600.000
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, untuk pemeliharaan videotron, billboard, pemeliharaan jaringan LAN, jasa perbaikan mesin cetak NPWD dan pemeliharaan UPS

semula	Rp. 182.450.000
bertambah	Rp. 178.000.000
menjadi	Rp. 360.450.000
2. Perubahan pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah :
- a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah :
- Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, penambahan belanja foto copy

semula	Rp. 44.389.745
bertambah	Rp. 763.250
menjadi	Rp. 45.152.995
 - Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, penambahan biaya belanja dan makan minum rapat pembahasan penyusunan produk hukum

semula	Rp. 214.198.000
bertambah	Rp. 1.812.500
menjadi	Rp. 216.010.500
 - Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, penambahan belanja cetak dan penggandaan baliho, billboard pajak daerah, makan minum kegiatan sosialisasi, belanja transportasi peserta sosialisasi, belanja pemasangan spanduk/baliho/bando pajak daerah

semula	Rp. 78.991.785
bertambah	Rp. 28.555.988
menjadi	Rp. 107.547.773

- | | | |
|---|------------|-----------------------|
| - Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, penambahan belanja jasa transportasi penagihan pajak daerah | | |
| semula | Rp. | 295.486.970 |
| bertambah | Rp. | 42.690.000 |
| menjadi | Rp. | 338.176.970 |
| - Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penambahan belanja penjilidan buku penghapusan piutang piutang PBB P2, fotocopy blanko pengantar SPOP dan LSOP, jasa kegiatan penyampaian dan penagihan PBB P2 dan jasa kerja lurah/kades dan staf kelurahan /desa | | |
| semula | Rp. | 885.946.086 |
| bertambah | Rp. | 243.585.600 |
| menjadi | Rp. | 1.129.531.686 |
| - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah, penambahan belanja foto copy dan penjilidan laporan tahunan realisasi penerimaan PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan lainnya | | |
| semula | Rp. | 111.603.751 |
| bertambah | Rp. | 1.052.066 |
| menjadi | Rp. | 112.655.817 |
| 3. Total DPA Semula pada MP1 | Rp. | 11.326.265.118 |
| bertambah | Rp. | 1.477.313.367 |
| menjadi | Rp. | 12.803.578.485 |

Demikian hasil keputusan forum ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bidang Ekonomi dan SDA

TABEL TG.33 PERUBAHAN

Kode Kegiatan	Uraian / Bidang Urusan Pemertintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target Kinerja Rejya				Rejya 2021				Target Kinerja DPA				DPA			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Berambah/ Berkurang	Berambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Berambah/ Berkurang	Berambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Berambah/ Berkurang	Berambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Berambah/ Berkurang	Berambah/ Berkurang
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 7-6	7	8	9 = 8-7	10	11 = 10-9	12	13	14	15 = 14-13			
5.02	KELUANGAN																
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERTintahan DAERAH																
5.02.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Rencana dan Rerjya Perangkat Daerah	5 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	8 Dokumen			63,761,000	63,761,000	(24,439,000)			63,761,000	63,761,000		63,761,000	63,761,000		
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan																
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		48 Orang														
5.02.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan			50,638,250	27,669,500	(22,968,750)			27,669,500	27,669,500		27,669,500	27,669,500		
5.02.01.2.03	Administrasi Umum																
5.02.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Sural Mengurat	12 Bulan	12 Bulan			3,877,341,799	2,867,941,674	(1,019,399,099)			2,867,941,674	2,867,941,674		2,867,941,674	2,867,941,674		
5.02.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
5.02.01.2.03.03	Kapmen 000 Menjadl Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Sural Menyurat pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penyediaan Urusan Pemertintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan			10,500,000	11,000,000	500,000			11,000,000	11,000,000		11,000,000	11,000,000		
5.02.01.2.03.04	Kapmen 000 Menjadl Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penyediaan Urusan Pemertintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan			294,900,000	314,596,500	19,696,500			314,596,500	314,596,500		314,596,500	314,596,500		
5.02.01.2.03.05	Kapmen 000 Menjadl Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penyediaan Urusan Pemertintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan														

Kode Kegiatan	Uraian / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target Kinerja Rencana			Rencana 2021			Target Kinerja DPA			DPA		
		Sebelum Perubahan	Selanjutnya Perubahan	Bertambah/Berkurang	Sebelum Perubahan	Selanjutnya Perubahan	Bertambah/Berkurang	Sebelum Perubahan	Selanjutnya Perubahan	Bertambah/Berkurang	Sebelum Perubahan	Selanjutnya Perubahan	Bertambah/Berkurang
5.02.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kepmen 050 Menjadi Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	22 Orang		537.940.000	273.870.000	(264.070.000)	12 Bulan	22 Orang		273.870.000	273.870.000	(2.400.000)
5.02.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kibernetika Kantor Kepmen 050 Menjadi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan		88.064.957	55.757.317	(32.307.640)	12 Bulan	12 Bulan		55.757.317	55.757.317	
5.02.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor Kepmen 050 Menjadi Sub Kegiatan Penyediaan Perawatan dan Penggantian Kantor pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.995 Buah		199.870.203	199.857.031	(113.172)	12 Bulan	4.995 Buah		199.857.031	199.857.031	-
5.02.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kepmen 050 Menjadi Sub Kegiatan Penyediaan Perawatan dan Penggantian Kantor pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	25.416 Buah		97.983.000	227.579.257	129.616.257	12 Bulan	25.416 Buah		111.480.857	227.579.257	116.098.400
5.02.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kepmen 050 Menjadi Sub Kegiatan Penyediaan Perawatan dan Penggantian Kantor pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	375 Buah		33.828.000	38.274.522	4.446.522	100 %	375 Buah		38.274.522	38.274.522	-
5.02.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kepmen 050 Menjadi Sub Kegiatan Penyediaan Perawatan dan Penggantian Kantor pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.800 Eksemplar		123.600.000	6.600.000	(117.000.000)	12 Bulan	1.800 Eksemplar		6.600.000	6.600.000	-
5.02.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman Kepmen 050 Menjadi Sub Kegiatan Penyediaan Perawatan dan Penggantian Kantor pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	914 Kotak		35.675.000	34.600.000	(1.075.000)	12 Bulan	914 Kotak		34.600.000	34.600.000	-
5.02.01.2.03.18	Rapat/Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kepmen 050 Menjadi Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan		1.300.000.000	443.753.000	(856.247.000)	12 Bulan	12 Bulan		443.753.000	443.753.000	-
5.02.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kepmen 050 Menjadi Sub Kegiatan Pengadaan Perawatan dan Pemeliharaan pada Kegiatan Pengadaan Barang/Mobil Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	151 Unit		256.400.000	488.114.047	231.714.047		151 Unit			488.114.047	488.114.047

Kode Kegiatan	Uraian / Bidang Urusan Penyelenggaraan Daerah dan Program / Kegiatan	Target Kinerja Ranja			Ranja 2021			Target Kinerja DPA			DPA		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	MP I - MP III (MP I)	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.2.03.28	Peneliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kapasitas 600 Meja/ Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1 Unit		164.000.000	127.800.000	(36.200.000)	100 %	1 Unit		127.800.000	127.800.000	-
5.02.01.2.03.30	Peneliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kapasitas 600 Meja/ Sub Kegiatan Penyelidikan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43 Unit	1 Unit 41 Unit		385.400.000	48.000.000 227.800.000	(337.400.000) 227.800.000	1 Unit 41 Unit	1 Unit 41 Unit		48.000.000 203.800.000	48.000.000 227.800.000	- 24.000.000
5.02.01.2.03.34	Peneliharaan Rutin/Berkala Perlatan Gedung Kantor Kapasitas 600 Meja/ Sub Kegiatan Pemeliharaan Perlatan dan Meubel Lainnya pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	138 Unit		351.000.000	360.450.000	9.450.000	100 %	138 Unit		182.450.000	360.450.000	178.000.000
5.02.01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				228.900.000	71.200.000	(158.700.000)				71.200.000	71.200.000	-
5.02.01.2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Peninggiannya	429 Sbl	128 Sbl	(301) Sbl	208.800.000	51.200.000	(158.700.000)	144 Sbl	128 Sbl		51.200.000	51.200.000	-
5.02.01.2.04.10	Bimbingan dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24 Orang	4 Orang	(20) Orang	20.000.000	20.000.000	-	24 Orang	4 Orang		20.000.000	20.000.000	-

Kode Kegiatan	Uraian / Bidang Uraian Pencapaian Daerah dan Program / Kegiatan	Target Kinerja Rencja			Rencja 2021			Target Kinerja DPA			DPA		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	MP 1 - MP II (MP 1)	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.04	PROGRAM PENGLOLAAN PENDAPATAN DAERAH				6.202.815.460	2.496.346.420	(3.706.475.039)				2.177.881.016	2.496.346.420	318.465.404
6.02.04.2.02	Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah				6.202.815.460	2.496.346.420	(3.706.475.039)				2.177.881.016	2.496.346.420	318.465.404
5.02.04.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis Pencapaian dan Pengembangan Pendapatan Daerah				120.047.000	45.152.995	(75.894.005)				44.380.745	45.152.995	763.250
	Kepmen 000 Menjadi Sub Kegiatan Pencapaian Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2 Kali 12 Bulan	2 Kali 12 Laporan					2 Kali 12 Bulan	2 Kali 12 Laporan				
5.02.04.2.02.02	Penyusunan Kebijakan Teknik Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				602.540.000	338.178.870	(264.361.000)				295.488.870	338.178.870	42.690.000
	Kepmen 000 Menjadi Sub Kegiatan Pencapaian dan Pengelolaan Objek Pajak Daerah pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	14.600 SKPD 2 Kali 10.441 SSPD	7.650 OPWP					14.600 SKPD 2 Kali 10.441 SSPD	7.650 OPWP		295.488.870		
5.02.04.2.02.05	Penyusunan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyediaan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat				1.867.820.000	107.547.773	(1.760.272.227)				78.991.785	107.547.773	28.555.988
	Kepmen 000 Menjadi Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyediaan Informasi Pajak Daerah pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 % 850 WP 100 %	3 Kali					850 WP 100 %	3 Kali		78.991.785		
5.02.04.2.02.06	Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi				808.700.000	216.010.500	(592.689.500)				214.196.000	216.010.500	1.812.500
	Kepmen 000 Menjadi Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Bulan	1 Dokumen 3 Produk 3 Mulum					12 Bulan 100 %	1 Dokumen 3 Produk 3 Mulum		214.196.000		

Kode Kegiatan	Uraian / Bidang Urusan Peningkatan Daerah dan Program / Kegiatan	Target Kinerja Rerja				Rerja 2021				Target Kinerja DPA				DPA		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Berlambat/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Berlambat/ Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Berlambat/ Berkurang	Sebelum Perubahan	MP I - MP III (MP I)	Setelah Perubahan	Berlambat/ Berkurang
5.02.04.2.02.08	Peningkatan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kerjasama 050 Menjadikan Sub Kegiatan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	110.000 SPPT 700 BPHTB 11 Kac 88 Kali 114.000 SPPT 6 M	105.000 SPPT 700 BPHTB 450 SSPD 5 BPHTB		1.384.625.000	1.129.531.685	(155.093.314)	110.000 SPPT 700 BPHTB 88 Kali 114.000 SPPT 6 M	105.000 SPPT 700 BPHTB 450 SSPD 5 BPHTB				885.940.000	885.940.000	1.129.531.685	243.585.000
5.02.04.2.02.09	Pemeliharaan dan Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kerjasama 050 Menjadikan Sub Kegiatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Kali 7.000 OP 700 OP	5 Aplikasi		588.400.000	178.548.951	(409.851.049)	1 Kali 7.000 OP 700 OP	5 Aplikasi				178.548.951	178.548.951	178.548.951	-
5.02.04.2.02.10	Pemeriksaan Pajak Daerah Kerjasama 050 Menjadikan Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeliharaan dan Pengawasan Pajak Daerah pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	16 Kali 100 % 10.441 SP/TPD/ SKPD	20 OP/WP		314.995.000	368.714.728	53.719.728	16 Kali 100 % 10.441 SP/TPD/ SKPD	20 OP/WP				368.714.728	368.714.728	368.714.728	-
5.02.04.2.02.11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kerjasama 050 Menjadikan Sub Kegiatan Pembiayaan dan Pengembangan Pengelolaan Retribusi Daerah pada Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12 Buku 12 Laporan 12 Bulan 12 Bulan 40 Jenis	12 Laporan 40 Jenis		487.088.460	112.855.817	(374.232.643)	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 40 Jenis	12 Laporan 40 Jenis				111.603.751	111.603.751	112.855.817	1.082.066
Jumlah		10.448.795.460	12.803.578.485	2.354.783.025				11.574.160.087	11.326.265.118				11.574.160.087	11.326.265.118	12.803.578.485	1.477.313.387